



KEMENTERIAN HUKUM
KANTOR WILAYAH
KALIMANTAN SELATAN

#bangga
melayani
bangsa



KEMENKUM KALSEL NEWS

BULETIN

MINGGU KE- **3** APRIL 2025



ENTRY MEETING BPK RI



CAPAIAN KEMENKUM RI



PELANTIKAN NOTARIS

KANWIL KEMENKUM KALIMANTAN SELATAN

- DIVISI PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN DAN PEMBINAAN HUKUM
- DIVISI PELAYANAN HUKUM
- BAGIAN TATA USAHA DAN UMUM

Terhubung lebih dekat:



[kemenkumkalsel](https://www.kemenkumkalsel.go.id)



[@kemenkumkalsel](https://twitter.com/kemenkumkalsel)



kalsel.kemenkum.go.id

Apel Pagi Perdana Pasca Libur Lebaran, Kakanwil Nuryanti Ajak Jajaran Tingkatkan Semangat Kerja



Banjarmasin, Humas_Info – Kantor Wilayah Kementerian Hukum Kalimantan Selatan menggelar Apel Pagi pada Senin (14/04/2025) di halaman kantor wilayah. Kegiatan ini merupakan apel perdana setelah libur panjang Idulfitri 1446 H.

Apel dimulai pukul 08.00 WITA dan diikuti oleh seluruh jajaran pegawai Kanwil Kemenkum Kalimantan Selatan. Kepala Kantor Wilayah, Nuryanti Widyastuti bertindak selaku Pembina Apel, sementara Kepala Bidang Pelayanan Kekayaan Intelektual, Riswandi bertugas sebagai Pemimpin Apel.

Dalam amanatnya, Kepala Kantor Wilayah menyampaikan bahwa apel pagi ini menjadi momentum penting untuk kembali menyatukan semangat dan fokus dalam bekerja. “Apel pagi kali ini merupakan apel pertama setelah kita libur panjang pasca Lebaran. Saya berharap kita dapat memulai hari dengan semangat untuk bekerja,” ujarnya.

Beliau juga menegaskan pentingnya optimalisasi kinerja dan serapan anggaran yang masih perlu ditingkatkan. “Kita kembali bekerja untuk memenuhi target kinerja dan serapan anggaran yang masih perlu dimaksimalkan,” tegasnya.

Apel pagi ini menjadi pengingat bahwa semangat baru pasca libur harus dibarengi dengan komitmen untuk terus berkinerja optimal demi mendukung tugas dan fungsi Kementerian Hukum di Kalimantan Selatan.

Apel diakhiri dengan bersalaman antara Pimti Pratama dengan jajaran pegawai Kantor Wilayah Kemenkum Kalimantan Selatan.



Kemenkum Kalsel Lantik 37 Notaris Baru, Kakanwil Tekankan Profesionalisme dan Integritas



Banjarmasin, Humas_Info – Sebanyak 37 notaris baru resmi dilantik dan diambil sumpah jabatannya oleh Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum Kalimantan Selatan (Kemenkum), Nuryanti Widyastuti, dalam acara yang dilaksanakan bertempat di Galaxy Hotel Banjarmasin, Senin (14/4/25).

Para Notaris baru yang mengemban peran strategis sebagai pejabat umum dalam menciptakan ketertiban hukum di tengah masyarakat ini diharapkan dapat melaksanakan tugas dengan penuh tanggung jawab dan integritas.

Kakanwil Kemenkum Kalsel, Nuryanti Widyastuti usai mengambil sumpah dan melantik para notaris dihadapan rohaniwan, saksi dan tamu undangan dalam sambutannya menyoroti sejumlah tantangan yang masih dihadapi dalam praktik kenotariatan. Beberapa permasalahan yang disebutkan antara lain pelanggaran terhadap kewajiban domisili wilayah kerja, lemahnya pengelolaan protokol notaris, kurangnya tenaga pendukung yang kompeten, hingga ketidak patuhan terhadap pelaporan dan tindak lanjut hasil pemeriksaan.

“Di era digital yang penuh tantangan ini, profesionalisme dan akuntabilitas menjadi kunci utama,” tegas Nuryanti.

Dengan tambahan 37 notaris baru ini, jumlah total notaris di Kalimantan Selatan kini mencapai 317 orang yang tersebar di bawah pengawasan lima Majelis Pengawas Daerah Notaris, meliputi Kota Banjarmasin, Kota Banjarbaru, Kabupaten Banjar, Kabupaten Tabalong, dan Kabupaten Tanah Laut.

Pelantikan ini juga dipandang sebagai momentum untuk melakukan pembenahan layanan kenotariatan di Kalimantan Selatan. Nuryanti mengajak para notaris yang baru dilantik untuk menjadi agen perubahan dalam mewujudkan pelayanan hukum yang lebih baik, adil, dan memberikan kepastian hukum bagi masyarakat.

Acara pelantikan turut dihadiri oleh pejabat manajerial Kanwil Kementerian Hukum Kalimantan Selatan, pengurus Ikatan Notaris Indonesia wilayah dan daerah serta tamu undangan lainnya.

BPK RI Lakukan Pemeriksaan Interim atas Laporan Keuangan Kementerian Hukum dan HAM Tahun Anggaran 2024 di Kalimantan Selatan



Banjarmasin, Humas_Info — Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Kalimantan Selatan menggelar kegiatan Entry Meeting Pemeriksaan Interim atas Laporan Keuangan Tahun Anggaran 2024, bekerja sama dengan Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia (BPK RI), pada Senin (14/04/2025) bertempat di Balai Pertemuan Garuda Kanwil Kemenkumham Kalsel.

Kegiatan ini merupakan tindak lanjut dari Surat Tugas Anggota I BPK RI Nomor 17/ST/III/1/2025 tertanggal 2 Januari 2025, yang menugaskan tim auditor untuk melakukan pemeriksaan atas laporan keuangan di lingkungan Kementerian Hukum dan HAM, termasuk di wilayah Kalimantan Selatan.

Entry meeting ini turut dihadiri oleh Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum Kalimantan Selatan, Nuryanti Widyastuti, Kepala Kanwil Direktorat Jenderal Imigrasi Kalimantan Selatan, Yan Wely Wiguna, Kepala Kanwil Direktorat Jenderal Pemasyarakatan Kalimantan Selatan, Mulyadi, serta perwakilan dari masing-masing kementerian termasuk Kantor Wilayah Kementerian HAM Kalimantan Selatan.

Acara dipimpin langsung oleh Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Kalimantan Selatan, Nuryanti Widyastuti bersama Pengendali Teknis BPK RI, Reni Herawati beserta tim pemeriksa dari BPK.

Dalam sambutannya, Nuryanti Widyastuti memaparkan bahwa kondisi laporan keuangan Kementerian Hukum dan HAM Kalimantan Selatan.

"Anggaran 2024 mencakup 30 satuan kerja dengan total anggaran sebesar Rp 264,93 miliar, dan realisasi penyerapan anggaran hingga 31 Desember 2024 mencapai 98,30% atau setara dengan Rp 260,43 miliar," ungkap Nuryanti.

Ia menekankan pentingnya transparansi dan kesiapan maksimal dari setiap satuan kerja dalam mendukung proses pemeriksaan, terutama dalam penyediaan data yang akurat dan valid bagi tim auditor.

Pemeriksaan interim ini bertujuan untuk meningkatkan kualitas pengelolaan keuangan dan Barang Milik Negara (BMN) di lingkungan Kementerian Hukum dan HAM, khususnya di wilayah Kalimantan Selatan. Kepala Kanwil juga mengajak seluruh jajaran untuk bersinergi dan bekerja sama dengan BPK RI demi mewujudkan tata kelola keuangan negara yang akuntabel dan transparan.

Kepala Divisi Pelayanan Hukum Hadiri Musrenbang RKPD Tapin 2025: Komitmen Kemenkum Kalimantan Selatan Dukung Pembangunan Daerah

Tapin, Yankum_Info — Kepala Divisi Pelayanan Hukum Kantor Wilayah Kementerian Hukum (Kemenkum) Kalimantan Selatan, Meidy Firmansyah, menghadiri Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) RKPD Kabupaten Tapin Tahun 2025 yang digelar di Aula Kantor Bupati Tapin, Senin (14/4). Kehadiran ini menjadi simbol nyata dukungan Kemenkum terhadap penguatan perencanaan pembangunan berbasis hukum dan kelembagaan yang berkelanjutan.

Mengusung tema “Penguatan SDM yang Unggul Berlandaskan Penataan Kelembagaan Pemerintah Daerah dan Pembangunan Infrastruktur yang Berkelanjutan”, Musrenbang kali ini menjadi momentum strategis untuk merumuskan arah kebijakan pembangunan Tapin yang lebih terarah dan berdampak langsung pada masyarakat.

Dalam sambutannya, Bupati Tapin, H. Yamani, menegaskan pentingnya Musrenbang sebagai forum partisipatif yang mendengarkan suara masyarakat dan menyusun langkah konkret pembangunan. Ia juga berharap Musrenbang kali ini mampu memutus garis kemiskinan dan membawa kemajuan nyata bagi daerah.

Meidy Firmansyah menyampaikan apresiasi atas terselenggaranya Musrenbang ini dan menegaskan komitmen Kanwil Kemenkum Kalimantan Selatan dalam memberikan dukungan hukum serta layanan kelembagaan yang sejalan dengan semangat pembangunan daerah.

"Kami menyambut baik pelaksanaan Musrenbang RKPD ini sebagai wadah yang tidak hanya menyusun program kerja, tetapi juga menguatkan sinergi antar lembaga. Semoga kegiatan ini menjadi pijakan kuat untuk mewujudkan kesejahteraan masyarakat Tapin secara merata," ujar Meidy.

Musrenbang yang berlangsung dengan khidmat ini diawali dengan lagu Indonesia Raya dan doa, dilanjutkan sambutan Ketua DPRD Tapin, Achmad Riduan Syah, serta pemaparan dari tiga narasumber terkait penguatan SDM dan pembangunan infrastruktur. Acara diakhiri dengan penandatanganan berita acara dan foto bersama sebagai simbol kolaborasi lintas sektor dalam pembangunan Tapin.



Kanwil Hukum Kalimantan Selatan Ikuti Webinar OKE KI #11: Strategi Merek Jadi Kunci Produk Daerah Tembus Pasar Luas



Banjarmasin, KI_Info – Kantor Wilayah Kementerian Hukum Kalimantan Selatan menunjukkan komitmennya dalam mendukung pengembangan potensi ekonomi daerah dengan mengikuti Webinar OKE KI edisi ke-11 yang mengangkat tema “Peran Merek untuk Optimalkan Produk Unggulan Wilayah.” Kegiatan ini digelar secara daring pada Senin (14/4) pukul 11.00 WITA, dan diikuti oleh jajaran manajerial dan non manajerial bidang pelayanan hukum dan kekayaan intelektual, termasuk tim Helpdesk Pelayanan KI secara daring.

Webinar ini menghadirkan Ranie Utami Ronie, Kasubid Permohonan dan Pelayanan Merek, sebagai narasumber utama. Dalam sesi pemaparannya, Ranie menekankan pentingnya penguatan merek (brand) sebagai fondasi strategis dalam membangun daya saing produk unggulan daerah. Menurutnya, merek bukan sekadar simbol visual, tetapi juga cerminan nilai, kualitas, dan kepercayaan yang dibangun antara produsen dan konsumen.

“Merek adalah identitas sekaligus janji. Tanpa merek yang kuat, produk lokal akan kesulitan untuk bertahan, apalagi bersaing di pasar nasional dan global,” ujarnya.

Lebih lanjut, Ranie memaparkan bahwa merek memegang peran strategis dalam pembangunan ekonomi daerah melalui empat aspek utama. Pertama, merek berperan penting dalam membentuk identitas dan citra produk. Dengan pendekatan branding yang tepat, produk lokal dapat mencerminkan kekayaan budaya dan tradisi yang khas dari daerah asalnya, menjadikannya unik di mata konsumen.

Kedua, keberadaan merek yang kuat dan didukung kemasan yang menarik dapat memperluas jangkauan pasar secara signifikan. Konsumen lebih tertarik pada produk yang memiliki tampilan profesional dan pesan yang jelas tentang keunggulan produknya.

Ketiga, strategi branding juga terbukti mampu meningkatkan nilai tambah produk. Produk dengan merek yang konsisten dan terpercaya mendorong pelaku usaha untuk terus berinovasi dan menjaga kualitas, bahkan menciptakan produk turunan yang memperluas portofolio usaha.

Terakhir, Ranie menekankan bahwa pengembangan merek tidak dapat berjalan sendiri. Kolaborasi menjadi kunci keberhasilan, di mana sinergi antara pemerintah daerah, pelaku usaha, komunitas, dan pemangku kepentingan lainnya harus terus dibangun demi menciptakan ekosistem usaha daerah yang tangguh dan berkelanjutan.

Dengan mengikuti kegiatan ini, Kanwil Kementerian Hukum Kalimantan Selatan mempertegas dukungannya terhadap perlindungan kekayaan intelektual dan pemberdayaan pelaku usaha lokal. Webinar ini menjadi momentum penting untuk menggugah kesadaran akan nilai strategis merek sebagai alat transformasi ekonomi daerah menuju kemandirian dan daya saing global.

Kanwil Kemenkum Kalsel Teken Perjanjian Pelaksanaan Bantuan Hukum Tahun 2025 dengan 11 PBH Terakreditasi



Banjarmasin, Humas_Info – Kantor Wilayah Kementerian Hukum Kalimantan Selatan melakukan Penandatanganan Perjanjian Pelaksanaan Bantuan Hukum Tahun 2025 dengan 11 Pemberi Bantuan Hukum (PBH) Terakreditasi, Senin (14/4/2025).

Kegiatan tersebut dilaksanakan langsung oleh Kepala Kantor Wilayah, Nuryanti Widyastuti, didampingi oleh Kepala Divisi Peraturan Perundang-undangan dan Pembinaan Hukum, Anton Edward Wardhana, bersama Ketua/Direktur masing-masing PBH.

Dalam sambutannya, Kepala Kantor Wilayah, Nuryanti Widyastuti, menegaskan bahwa penandatanganan ini merupakan dasar hukum dalam pelaksanaan pemberian bantuan hukum kepada masyarakat miskin di Kalimantan Selatan.

"Penandatanganan perjanjian pelaksanaan bantuan hukum hari ini merupakan dasar bagi kita dalam melaksanakan pemberian bantuan hukum kepada orang atau kelompok masyarakat miskin di Kalimantan Selatan," ujar Nuryanti.

Ia menyampaikan bahwa penyelenggaraan bantuan hukum adalah perintah konstitusi yang dituangkan dalam Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2011 tentang Bantuan Hukum. Kebijakan ini merupakan bentuk implementasi nyata negara dalam menjamin hak asasi warga negara atas keadilan dan kesamaan di hadapan hukum.

Lebih lanjut, Nuryanti menyampaikan apresiasi kepada seluruh PBH atas capaian kinerja tahun sebelumnya.

"Kami menyampaikan apresiasi yang setinggi-tingginya kepada para Ketua/Direktur PBH yang telah menjalankan tanggung jawabnya dengan baik. Hal ini dibuktikan dengan realisasi penyerapan anggaran bantuan hukum tahun 2024 sebesar 99,95%," ungkapnya.

Pada periode 2025–2027, terdapat peningkatan jumlah PBH terakreditasi di Kalimantan Selatan. Sebanyak empat PBH baru mendapatkan akreditasi, sehingga total menjadi 11 PBH terakreditasi.

Namun demikian, Nuryanti juga menyampaikan bahwa anggaran bantuan hukum pada tahun 2025 mengalami penyesuaian akibat kebijakan efisiensi nasional berdasarkan Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2025 tentang Efisiensi Belanja Negara dan Daerah.

Nuryanti juga mengajak seluruh Ketua atau Direktur PBH untuk memaksimalkan peran dan tanggung jawabnya dalam memberikan layanan hukum gratis kepada masyarakat tidak mampu, sesuai Permenkumham Nomor 4 Tahun 2021 tentang Standar Layanan Bantuan Hukum.

"Silakan manfaatkan kesempatan baik ini untuk memaksimalkan tugas memberikan jasa hukum. Pada akhirnya, semakin banyak masyarakat miskin yang menghadapi permasalahan hukum dapat memperoleh bantuan hukum secara gratis," pungkasnya.

Adapun 11 PBH Terakreditasi di Kalimantan Selatan pada periode 2025–2027 adalah sebagai berikut:

1. Lembaga Konsultasi dan Bantuan Hukum Untuk Wanita dan Keluarga Kalimantan Selatan ;
 2. Lembaga Konsultasi dan Bantuan Hukum Universitas Lambung Mangkurat ;
 3. Lembaga Bantuan Hukum Intan ;
 4. Lembaga Bantuan Hukum Peduli Hukum dan Keadilan ;
 5. Pos Bantuan Hukum Advokat Indonesia Banjarbaru ;
 6. Pos Bantuan Hukum Advokat Indonesia Pelaihari ;
 7. Yayasan Bantuan Hukum Sipakatuo ;
 8. Lembaga Konsultasi dan Bantuan Fakultas Syariah UIN Antasari Banjarmasin ;
 9. Perkumpulan Bantuan Hukum Gawi Sabumi ;
 10. Perkumpulan Bantuan Hukum Keadilan Banjarmasin ;
 11. Pos Bantuan Hukum Advokat Indonesia Kalimantan Selatan
- Turut hadir dalam kegiatan ini jajaran pejabat manajerial Kanwil Kemenkum Kalsel, Kanwil HAM Kalsel, Kanwil Ditjen Pemasarakatan Kalsel, Ketua dan Direktur PBH, serta tamu undangan lainnya.

Kanwil Kemenkum Kalsel dan BPHN Gelar Rapat Persiapan Analisis dan Evaluasi Perda Tahun 2025



Banjarmasin, Humas_Info - Kantor Wilayah Kementerian Hukum Kalimantan Selatan (Kanwil Kemenkum Kalsel) bersama Badan Pembinaan Hukum Nasional (BPHN) melaksanakan Rapat Persiapan Kegiatan Analisis dan Evaluasi Peraturan Daerah (Perda), Senin (15/4/2025).

Rapat yang dilaksanakan secara daring ini diikuti oleh Kepala Divisi Peraturan Perundang-undangan dan Pembinaan Hukum, Anton Edward Wardhana, para Analis Hukum, Perancang Peraturan Perundang-undangan, serta tim dari BPHN.

Agenda rapat membahas persiapan pelaksanaan kegiatan analisis dan evaluasi perda yang dijadwalkan berlangsung mulai bulan April hingga September 2025. Kegiatan ini merupakan bagian dari program strategis BPHN dalam melakukan telaahan dan peninjauan kembali efektivitas serta kesesuaian perda dengan peraturan perundang-undangan yang ada.

Dalam pelaksanaannya, ditetapkan lima perda yang akan dianalisis dan dievaluasi berdasarkan lima tema prioritas nasional, yaitu: swasembada pangan, swasembada energi, hilirisasi komoditas, pengelolaan lahan, dan makanan bergizi gratis. Jumlah tersebut merupakan batas minimal yang diminta oleh BPHN.

Adapun lima perda yang telah diinventarisasi dan siap untuk dianalisis adalah:

1. Perda Provinsi Kalimantan Selatan Nomor 10 Tahun 2015 tentang Penyelenggaraan Bantuan Hukum untuk Masyarakat Miskin
2. Perda Kabupaten Tabalong Nomor 04 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Perlindungan Perempuan dan Anak
3. Perda Kabupaten Tanah Bumbu Nomor 2 Tahun 2019 tentang Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan
4. Perda Kabupaten Hulu Sungai Utara Nomor 5 Tahun 2019 tentang Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan
5. Perda Kabupaten Balangan Nomor 20 Tahun 2014 tentang Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan

Kepala Divisi Peraturan Perundang-undangan dan Pembinaan Hukum, Anton Edward Wardhana menyampaikan bahwa rapat berjalan dengan lancar dan produktif sebagai bentuk komitmen dalam mendukung upaya harmonisasi regulasi di daerah.

“Rapat yang dilaksanakan hari ini berjalan optimal dengan partisipasi aktif seluruh pihak, baik dari Kanwil maupun BPHN. Kami siap mendukung pelaksanaan analisis dan evaluasi perda sebagai bagian dari kontribusi terhadap pembangunan hukum nasional yang lebih baik,” ujar Anton.

Melalui kegiatan ini, diharapkan hasil analisis dan evaluasi perda dapat memberikan masukan strategis bagi pemerintah daerah dalam melakukan perbaikan atau penyesuaian terhadap regulasi yang ada, sehingga lebih responsif terhadap kebutuhan masyarakat dan arah kebijakan nasional.

Begini Capaian Kinerja Kemenkum Pada Triwulan I 2025



Jakarta - Kementerian Hukum (Kemenkum) telah mencatatkan sejumlah capaian kinerja pada periode Januari-Maret (triwulan I) tahun 2025. Menteri Hukum (Menkum), Supratman Andi Agtas, menjelaskan bahwa Kemenkum memiliki enam bidang layanan yang berhubungan langsung dengan masyarakat, yaitu layanan administrasi hukum umum (AHU), layanan kekayaan intelektual (KI), layanan peraturan perundang-undangan (PP), layanan pembinaan hukum nasional, layanan strategi kebijakan, dan layanan pengembangan sumber daya manusia (SDM).

Di bidang AHU, Kemenkum telah menyelesaikan 2.900.948 permohonan atau sebesar 99,57% dari total 2.913.595 permohonan yang masuk. Permohonan-permohonan tersebut terkait layanan hukum perdata, hukum pidana, badan usaha, hukum tata negara, dan otoritas pusat dan hukum internasional. Dari keseluruhan layanan ini, Kemenkum telah mendapatkan penerimaan negara bukan pajak (PNBP) sebesar Rp311.313.889.586.

Dalam tiga bulan pertama 2025 ini, Kemenkum berhasil menyelesaikan proses naturalisasi kepada enam atlet sepak bola untuk melengkapi kekuatan tim nasional di berbagai laga internasional. Mereka adalah Dion Markx, Tim Geypens, Ole Romenij, Dean James, Emil Audero, serta Joey Pelupessy.

“Bertambahnya pemain berkualitas akan membuat Timnas tampil maksimal dalam kompetisi skala internasional. Beberapa agenda besar yang menjadi target utama di antaranya adalah FIFA World Cup 2026, Asian Qualifiers Round 3, AFC Asian Cup Saudi Arabia 2027, Peringkat 100 besar FIFA, dan 10 besar Asia dalam FIFA Matchday,” kata Supratman, Selasa (15/04/2025) di kantor Kemenkum Jakarta.

Selanjutnya, di bidang KI, Kemenkum telah menyelesaikan 116.126 permohonan, termasuk permohonan tahun sebelumnya, yang didominasi oleh sektor merek sebanyak 66.995 permohonan dan hak cipta sebanyak 36.296 permohonan. Lewat percepatan penyelesaian permohonan merek, maka Kemenkum tidak lagi memiliki tunggakan pelayanan di sektor merek dari tahun sebelumnya. Dari keseluruhan layanan KI, Kemenkum berhasil menerima PNBP sebesar Rp220.903.378.668.

“Program percepatan pemeriksaan substansi merek berdampak secara langsung pada penyelesaian penerbitan sertifikat merek sebanyak 66.995. Penerbitan sertifikat merek adalah wujud kepastian hukum bagi para pelaku usaha untuk menggunakan merek secara legal dan eksklusif dalam kegiatan berbisnis,” ucap Menkum.

Pada level internasional, Indonesia berada pada posisi pertama permohonan paten sejumlah 715 permohonan, pula peringkat pertama permohonan desain industri sebanyak 1.186 permohonan. Posisi Indonesia melampaui Jepang, Cina, Amerika, dan Korea.

Kemudian, di bidang PP, Kemenkum tengah menyiapkan Rancangan Undang-Undang (RUU) dan Rancangan Peraturan Pemerintah (RPP) pelaksanaan KUHP baru yang masuk dalam prioritas nasional.

“Kami menyiapkan delapan RUU yang masuk prolegnas, antara lain RUU Grasi, Amnesti, Abolisi, dan Rehabilitasi, serta RUU Narkotika dan Psikotropika. Juga tiga RPP terkait pelaksanaan KUHP yang akan berlaku tahun 2026 mendatang,” beber pria kelahiran Soppeng Sulawesi Selatan ini.



Hingga Maret 2025, Kemenkum juga telah menyelesaikan 2.179 proses harmonisasi PP di bidang polhukhankam, pemimipas, komdigi, kesejahteraan rakyat, perekonomian, serta peraturan daerah. Capaian harmonisasi ini ditargetkan akan meningkat setelah dilakukannya peluncuran aplikasi e-Harmonisasi pada Februari lalu. Inovasi ini meningkatkan kecepatan dan transparansi proses harmonisasi PP.

“e-Harmonisasi memiliki beberapa keunggulan, yaitu instansi pengusul dapat mengajukan permohonan secara daring, dengan jangka waktu hanya 5 hari kerja, dan prosesnya dilakukan secara transparan dan akuntabel,” ujarnya.

Berikutnya, bidang pembinaan hukum nasional, Kemenkum memberikan bantuan hukum gratis melalui organisasi bantuan hukum terakreditasi kepada masyarakat tidak mampu. Untuk tahun 2025-2027, telah terdaftar 777 pemberi bantuan hukum guna pendampingan dan konsultasi hukum. Selain itu, Kemenkum telah menginisiasi pendirian 1.764 pos bantuan hukum (posbankum) di desa dan kelurahan di seluruh Indonesia.

“Posbankum ini akan memberikan layanan hukum berupa informasi, konsultasi, mediasi, serta rujukan ke pemberi bantuan hukum/advokat probono yang dibutuhkan oleh masyarakat, baik di desa maupun kelurahan sesuai dengan peraturan perundang-undangan,” jelasnya.

Kemenkum berupaya meningkatkan literasi hukum masyarakat melalui Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Nasional (JDIHN). Sampai dengan bulan Maret tahun ini, terdapat 658.361 dokumen hukum yang telah terintegrasi pada jdihn.go.id, dengan jumlah anggota JDIHN sebanyak 1.679 anggota.

Dalam bidang strategi kebijakan, Kemenkum menyediakan layanan jurnal elektronik (e-Journal) yang merupakan platform digital untuk menyajikan berbagai karya ilmiah. Hingga saat ini, terdapat tiga jurnal terbitan Kemenkum yang terakreditasi SINTA 2, yaitu Jurnal Hukum De Jure, Jurnal HAM, dan Jurnal Ilmiah Kebijakan Hukum (JIKH), dengan total halaman dilihat sebanyak 41.858 pada triwulan I 2025. Sepanjang Januari hingga Maret 2025, Kemenkum telah mempublikasikan sembilan artikel ilmiah pada dua jurnal yaitu lima artikel pada Jurnal Hukum De Jure dan empat artikel pada JIKH. Selain itu, juga terdapat layanan e-Book yang memberikan informasi atas hasil kajian/analisis kebijakan bidang hukum bagi para pemangku kepentingan dan masyarakat.

“Semua layanan jurnal dan buku elektronik kami dapat diakses secara gratis. Masyarakat dapat memanfaatkannya untuk berbagai tujuan, entah itu pengambilan kebijakan, akademik, ataupun penelitian,” tandasnya.

Ada pula layanan Kemenkum di bidang pengembangan SDM. Kemenkum menyelenggarakan berbagai jenis pelatihan, baik untuk internal maupun stakeholder eksternal Kemenkum. Pada periode Januari-Maret 2025, tercatat sebanyak 17.212 peserta telah mengikuti pelatihan klasikal maupun pembelajaran jarak jauh. Selain itu, Kemenkum sedang melakukan pengembangan Politeknik Pengayoman Indonesia (Poltekipin) sehingga nantinya akan ada program studi baru di bidang pelayanan hukum, yaitu program studi Pembangunan Hukum, Perancangan Peraturan Perundang-Undangan, Hukum Kekayaan Intelektual, dan Administrasi Hukum Umum.

Supratman menyebutkan semua tren positif capaian kinerja Kemenkum tidak terlepas dari program transformasi digital yang telah diterapkan sejak pertama kali ia menjabat sebagai Menkum. Ia menargetkan di tahun 2026 semua layanan Kemenkum dapat dinikmati masyarakat secara digital.

“Transformasi digital akan membangun budaya kerja berbasis teknologi untuk memberikan pelayanan hukum yang cepat, efisien, kolaboratif, dan inklusif bagi masyarakat. Program ini juga akan meningkatkan kepercayaan masyarakat internasional pada ekosistem hukum di Indonesia,” tutup Supratman.

Secara terpisah, Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum Kalimantan Selatan, Nuryanti Widyastuti turut berbangga atas capaian Kemenkum pada Triwulan I 2025.

“Capaian kinerja Kementerian Hukum pada Triwulan I 2025 menunjukkan komitmen nyata dalam menghadirkan pelayanan publik yang transparan, cepat, dan berbasis digital. Kami di Kantor Wilayah Kemenkum Kalimantan Selatan turut mengakselerasi implementasi program prioritas tersebut, mulai dari percepatan layanan AHU dan KI hingga penguatan literasi hukum melalui JDIHN. Inovasi seperti e-Harmonisasi serta perluasan akses bantuan hukum melalui posbankum menjadi bukti bahwa pelayanan hukum kini semakin dekat dan inklusif bagi seluruh lapisan masyarakat,” ucapnya.

“Atas arahan Bapak Menteri Supratman Andi Agtas, kami terus berupaya memperkuat sinergi antar unit kerja agar target transformasi digital 2026 dapat tercapai secara menyeluruh di seluruh wilayah, termasuk Kalimantan Selatan,” ungkap Nuryanti.

Talkshow Kemenkum Kalsel bersama RRI Banjarmasin Bahas Pentingnya Perlindungan Merek Usaha Lewat HAKI



Banjarmasin, Humas_Info — Kantor Wilayah Kementerian Hukum Kalimantan Selatan bekerja sama dengan RRI Pro 1 Banjarmasin menggelar talkshow edukatif bertajuk Melindungi Merek Usaha Lewat HAKI, pada Rabu (16/04/2025). Kegiatan ini disiarkan secara langsung melalui kanal Radio dan YouTube RRI Pro 1 Banjarmasin.

Hadir sebagai narasumber, Riswandi selaku Kepala Bidang Pelayanan Kekayaan Intelektual Kantor Wilayah memberikan pemaparan terkait pentingnya perlindungan merek usaha melalui Hak Kekayaan Intelektual (HAKI). Talkshow ini dipandu oleh presenter Fitriana Rahma yang membuka diskusi dengan pertanyaan seputar urgensi mendaftarkan merek bagi pelaku usaha.

Dalam penjelasannya, Riswandi menyampaikan bahwa merek merupakan hak eksklusif yang diberikan oleh negara, yang berfungsi untuk melindungi produk dari potensi klaim atau penjiplakan oleh pihak lain. "Produk yang memiliki nilai potensial dan komersial sangat mudah direbut oleh kompetitor jika tidak dilindungi secara hukum," tegasnya.

Ia juga menambahkan bahwa biaya Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) untuk pendaftaran merek cukup terjangkau, yakni sebesar Rp500.000 bagi pelaku UMKM, dengan syarat melampirkan surat rekomendasi dari dinas terkait.

Lebih lanjut, Riswandi menyoroti potensi besar Kalimantan Selatan dalam menghasilkan karya lokal yang belum semuanya terlindungi secara hukum. "Banyak karya lokal yang belum memiliki merek terdaftar, sehingga berisiko diakui oleh pihak lain. Ini menjadi tantangan sekaligus peluang bagi masyarakat untuk lebih sadar akan pentingnya HAKI," tutupnya.

Melalui talkshow ini, diharapkan pelaku usaha di Kalimantan Selatan semakin terdorong untuk melindungi identitas dan orisinalitas produknya melalui pendaftaran merek secara resmi.

Kemenkum Kalimantan Selatan Terima Kunjungan Audiensi Sekretariat DPRD Tapin



Banjarmasin, Humas_Info — Kantor Wilayah Kementerian Hukum Kalimantan Selatan menerima kunjungan audiensi dari Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Tapin pada Rabu (16/04/2025).

Kunjungan tersebut disambut langsung oleh Kepala Divisi Peraturan Perundang-undangan dan Pembinaan Hukum, Anton Edward Wardhana, bersama jajaran pejabat struktural di lingkungan Kanwil.

Audiensi ini dilaksanakan dalam rangka koordinasi dan konsultasi terkait rencana kerja sama melalui nota kesepahaman (MoU) mengenai penyusunan Naskah Akademik dan Draf Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda) Inisiatif DPRD Kabupaten Tapin.

Sekretaris DPRD Tapin, Noor Ifansyah, hadir bersama jajaran untuk berdiskusi langsung terkait langkah-langkah teknis dan substansi yang diperlukan dalam proses penyusunan regulasi daerah tersebut.

Melalui pertemuan ini, diharapkan terjalin sinergi antara DPRD Kabupaten Tapin dan Kanwil Kemenkum Kalimantan Selatan dalam mendukung terwujudnya produk hukum daerah yang berkualitas dan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.



Kemenkum Kalsel Gelar Sosialisasi IRH 2025, Dorong Kolaborasi Daerah Wujudkan Reformasi Hukum

Banjarmasin, Humas_Info - Kantor Wilayah Kementerian Hukum Kalimantan Selatan (Kanwil Kemenkum Kalsel) dan Badan Strategi Kebijakan (BSK) Kementerian Hukum RI menggelar kegiatan Sosialisasi Pendampingan Pemenuhan Data Dukung Indeks Reformasi Hukum (IRH) kepada pemerintah daerah se-Kalimantan Selatan yang digelar di Balai Pertemuan Garuda Kemenkum Kalsel, Rabu (16/4/25).

Kegiatan secara resmi dibuka oleh Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum Kalimantan Selatan, Nuryanti Widyastuti. Dalam sambutannya, Kakanwil menyampaikan apresiasi yang tinggi kepada seluruh peserta, khususnya para perwakilan dari Biro Hukum dan Bagian Hukum pemerintah daerah yang hadir secara langsung maupun daring. Menurutnya, partisipasi aktif peserta merupakan bukti nyata semangat kolaborasi dalam mendukung upaya reformasi hukum di daerah.

“Keberadaan pemerintah daerah sangat penting sebagai mitra strategis Kementerian Hukum dalam mewujudkan pelayanan publik yang bersih, efektif, dan berpihak pada masyarakat,” ujarnya.

Kegiatan ini turut dihadiri Kepala Pusat Strategi Kebijakan Pembentukan Peraturan Perundang-undangan dan Pembinaan Hukum BSK Kemenkum RI, Junarlis yang menjadi narasumber dan memberikan pemahaman serta solusi atas kendala yang dihadapi daerah dalam memenuhi indikator penilaian IRH.

Nuryanti menekankan bahwa IRH merupakan instrumen penting untuk mengukur keberhasilan reformasi hukum, termasuk upaya identifikasi, pemetaan, serta deregulasi peraturan di daerah.

Kepala Pusat Strategi Kebijakan Pembentukan Peraturan Perundang-undangan dan Pembinaan Hukum BSK Kemenkumham RI, Junarlis, menegaskan bahwa reformasi hukum yang efektif sangat berpengaruh terhadap kepastian hukum.

“Indeks Reformasi Hukum bukan sekadar angka penilaian, tapi cerminan sejauh mana pemerintah daerah mampu membangun sistem hukum yang pasti, transparan, dan berpihak pada masyarakat,” ujar Junarlis dalam paparannya.

Ia menambahkan, IRH dirancang untuk mengukur berbagai aspek reformasi hukum mulai dari harmonisasi regulasi, peningkatan kompetensi legal drafter, hingga deregulasi aturan yang tidak lagi relevan.

“Kualitas data dukung sangat menentukan. Karena itu, pemerintah daerah harus serius mempersiapkan seluruh dokumen dengan lengkap dan tepat, agar penilaian tahun ini bisa lebih baik dari sebelumnya,” sambungnya.

Menurut Junarlis, kolaborasi lintas sektor, kerja tim yang solid, dan komitmen tinggi dari tiap unit hukum di daerah adalah kunci untuk meraih hasil maksimal.

“Kita tidak bisa bekerja sendiri-sendiri. Reformasi hukum butuh sinergi kuat agar hasilnya benar-benar menyentuh substansi dan memberi dampak nyata bagi masyarakat,” pungkasnya.

Pada kegiatan yang juga digelar secara daring melalui platform Zoom Meeting, para peserta menunjukkan antusiasme sepanjang sesi berlangsung. Tak hanya menyimak paparan narasumber, mereka juga aktif terlibat dalam sesi tanya jawab. Berbagai pertanyaan dan masukan disampaikan, mulai dari teknis pemenuhan data dukung hingga kendala yang kerap dihadapi di lapangan.



220 Ormas di Banjarmasin Tak Miliki Sekretariat, Tim Terpadu Lintas Instansi Bergerak!



Banjarmasin, AHU_Info – Sebuah temuan mencengangkan mencuat dalam Rapat Tim Terpadu Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan (Ormas) Tahun 2025 yang digelar di Aula Politik Kantor Wali Kota Banjarmasin, Rabu (16/4). Dari total 220 Ormas yang terdaftar di Kota Banjarmasin, sebagian besar diketahui tidak memiliki sekretariat tetap, yang menimbulkan pertanyaan besar mengenai keberadaan dan aktivitas nyata organisasi-organisasi tersebut.

Rapat yang dipimpin langsung oleh Wali Kota Banjarmasin, H. Muhammad Yamin HR, ini dihadiri oleh jajaran penting lintas sektor, antara lain Kantor Wilayah Kementerian Hukum Kalimantan Selatan (Kemenkum Kalsel), Kejaksaan Negeri, Polresta Banjarmasin, BINDA, Kementerian Agama, para camat se-Kota Banjarmasin, serta perwakilan OPD terkait dan tokoh masyarakat. Dalam sambutannya, Wali Kota menekankan bahwa keberadaan Ormas harus sesuai dengan ketentuan hukum dan wajib terdata dengan baik. “Organisasi kemasyarakatan harus tertib administrasi, memiliki legalitas jelas, serta tidak menyimpang dari aturan perundang-undangan yang berlaku,” tegasnya.

Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik (Kesbangpol) Kota Banjarmasin, Lukman Fadlun, memaparkan kondisi aktual Ormas yang ada. Dari data yang dihimpun, banyak Ormas hanya tercatat di atas kertas namun tidak memiliki keberadaan fisik yang jelas. “Ini menjadi perhatian serius. Kami akan melakukan inventarisasi dan verifikasi lebih lanjut terhadap keberadaan serta legalitas mereka,” jelas Lukman.

Dukungan penuh disampaikan oleh Dewi Woro Lestari, Kepala Bidang Pelayanan Administrasi Hukum Umum Kanwil Kemenkum Kalsel yang hadir mewakili Kepala Kantor Wilayah, Nuryanti Widyastuti. Dalam paparannya, ia menegaskan pentingnya legalitas formal melalui pendaftaran di Sistem Administrasi Hukum Umum (AHU Online). “Kami siap memfasilitasi proses legalitas bagi Ormas agar tertib hukum dan administratif. Ini bagian dari komitmen kami untuk mendukung pengawasan terpadu,” ujar Dewi. Rapat berlangsung dalam suasana kolaboratif dan penuh keseriusan. Seluruh peserta menyepakati perlunya penguatan sinergi antar lembaga untuk mewujudkan tata kelola Ormas yang tertib, sah, dan bermanfaat bagi masyarakat.

Kegiatan ini menjadi langkah awal yang strategis dalam membangun pengawasan yang menyeluruh terhadap organisasi kemasyarakatan. Kantor Wilayah Kemenkum Kalsel melalui Bidang Pelayanan Administrasi Hukum Umum berkomitmen untuk terus mendampingi proses ini, serta memberikan edukasi hukum bagi Ormas di wilayah Kota Banjarmasin. “Ini bukan hanya soal administrasi, tapi juga soal menjaga ketertiban sosial dan hukum. Kami akan terus dorong agar seluruh Ormas tertib badan hukum,” tutup Dewi Woro Lestari.

Fasilitasi Pembentukan Produk Hukum, Kemenkum Kalsel Harmonisasikan Tiga Ranperbup HST



Banjarmasin, Humas_Info – Kantor Wilayah Kementerian Hukum Kalimantan Selatan (Kanwil Kemenkum Kalsel) bersama Pemerintah Kabupaten Hulu Sungai Tengah menggelar kegiatan rapat harmonisasi, Rabu (16/4/25).

Bertempat di Balai Pertemuan Garuda Kanwil Kemenkum Kalsel, rapat harmonisasi ini dipimpin oleh Kepala Divisi Peraturan Perundang-undangan dan Pembinaan Hukum, Anton Edward Wardhana, serta dihadiri oleh para JFT Perancang Peraturan Perundang-undangan.

Kegiatan ini turut dihadiri oleh Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) terkait di lingkungan Pemerintah Kabupaten Hulu Sungai Tengah, yaitu Badan Perencanaan, Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah Kabupaten Hulu Sungai Tengah, Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Hulu Sungai Tengah, Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Hulu Sungai Tengah, serta Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kabupaten Hulu Sungai Tengah.

Pada rapat harmonisasi kali ini, sebanyak tiga Rancangan Peraturan Bupati (Ranperbup) dibahas, yaitu:

1. Rancangan Peraturan Bupati Hulu Sungai Tengah tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2025.
2. Rancangan Peraturan Bupati Hulu Sungai Tengah tentang Penetapan Rincian Alokasi Dana Desa Kurang Salur, Bagi Hasil Pajak, dan Bagi Hasil Retribusi Daerah Kurang Salur untuk Setiap Desa di Kabupaten Hulu Sungai Tengah Tahun Anggaran 2025.
3. Rancangan Peraturan Bupati Hulu Sungai Tengah tentang Penyelenggaraan Inovasi Daerah.

Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Hulu Sungai Tengah, Eddy Rahmawan, menyampaikan bahwa harmonisasi atas ranperbup yang sedang disusun sangat penting guna memastikan kesesuaian dengan ketentuan yang berlaku. "Kami berharap adanya koreksi, masukan, dan saran agar produk hukum ini dapat menjadi landasan yang baik bagi pemerintah maupun masyarakat," ujarnya.

Sementara itu, Kepala Divisi Peraturan Perundang-undangan dan Pembinaan Hukum Kanwil Kemenkum Kalsel, Anton Edward Wardhana, menegaskan bahwa harmonisasi peraturan merupakan amanat undang-undang yang bertujuan untuk memastikan tidak ada produk hukum yang saling bertentangan.

"Kegiatan ini juga menjadi momentum yang baik untuk mempererat silaturahmi antara Kemenkum dan pemerintah daerah dalam upaya bersama menciptakan regulasi yang berkualitas," pungkasnya.

Ormas Kabupaten Banjar Disorot, Kanwil Kemenkum Kalsel Tekankan Pentingnya Legalitas



Banjarbaru, AHU_Info – Dalam rangka meningkatkan pemahaman hukum dan mendorong terwujudnya organisasi kemasyarakatan (Ormas) yang cerdas dan tertib, Badan Kesatuan Bangsa dan Politik (Kesbangpol) Kabupaten Banjar menggelar kegiatan Sosialisasi dan Pengawasan Ormas yang berlangsung pada Rabu(16/04), bertempat di Hotel Rodita Banjarbaru.

Kegiatan ini dihadiri oleh Kepala Divisi Pelayanan Hukum Kantor Wilayah Kementerian Hukum Kalimantan Selatan, Meidy Firmansyah, yang mewakili Kepala Kantor Wilayah sekaligus bertindak sebagai narasumber. Acara dimulai dengan menyanyikan lagu Indonesia Raya dan pembacaan doa, dilanjutkan dengan laporan penyelenggaraan kegiatan oleh Kepala Bidang Politik Dalam Negeri dan Organisasi Kemasyarakatan, Ir. Rusydah. Pelaksana Tugas Kepala Badan Kesbangpol Kabupaten Banjar, H. Makmur, MPD, dalam sambutannya menegaskan bahwa Ormas merupakan bagian tak terpisahkan dari dinamika sosial dan pembangunan nasional. Ia menyampaikan bahwa peran Ormas tidak hanya menjadi representasi hak asasi manusia, tetapi juga sebagai penguat persatuan dan ketertiban masyarakat. Dalam konteks Kabupaten Banjar, ia menilai kondisi Ormas saat ini relatif kondusif tanpa adanya konflik atau tindakan anarkis. Oleh karena itu, ia berharap Ormas dapat terus menjadi pendingin dalam masyarakat melalui komunikasi yang intensif dan koordinasi yang baik.

Meidy Firmansyah kemudian menyampaikan materi dengan judul “Pentingnya Mendaftarkan Diri Menjadi Ormas Berbadan Hukum di Wilayah Kabupaten Banjar.” Dalam paparannya, ia menjelaskan bahwa Ormas secara umum terbagi menjadi dua kategori, yaitu yang berbadan hukum dan yang tidak berbadan hukum. Ia menjelaskan secara mendalam mengenai pengertian badan hukum, dasar hukum yang mengaturnya, unsur-unsur yang membentuk Ormas, serta manfaat nyata yang diperoleh apabila Ormas memiliki legalitas yang sah. Salah satu poin penting yang disampaikan adalah bahwa Ormas berbadan hukum berkesempatan mendapatkan akses terhadap bantuan pendanaan dari pemerintah, yang tentunya tidak dapat diperoleh oleh Ormas yang tidak terdaftar secara resmi.

Materi berikutnya disampaikan oleh Hj. Sundusiah selaku Kepala Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial Budaya, Agama dan Organisasi Kemasyarakatan pada Kesbangpol Kalsel. Dalam pemaparannya, ia menjelaskan secara rinci tentang tugas pokok dan fungsi Badan Kesbangpol dalam pengawasan serta proses pendaftaran Ormas. Ia juga memperkenalkan dua sistem aplikasi, yaitu Siola dan Siormas, yang memudahkan proses pendaftaran Ormas tanpa dikenai biaya. Ia menambahkan bahwa legalitas melalui pendaftaran resmi tidak hanya membuka akses ke berbagai fasilitas, tetapi juga memperkuat partisipasi Ormas dalam pembangunan daerah. Kegiatan dilanjutkan dengan sesi diskusi yang berlangsung cukup dinamis. Beberapa peserta dari Ormas yang hadir menyampaikan pertanyaan-pertanyaan kritis, seperti apakah ada batas waktu minimum dalam pengajuan dana hibah untuk Ormas baru, bagaimana tanggung jawab Ormas daerah bila terjadi pelanggaran oleh induk pusatnya, serta bagaimana bentuk pengawasan terhadap Ormas yang melanggar ketentuan.

Melalui kegiatan ini, Kantor Wilayah Kementerian Hukum Kalimantan Selatan menegaskan kembali komitmennya dalam mendukung proses legalisasi Ormas serta mendorong peningkatan kesadaran hukum di tengah masyarakat. Sosialisasi ini diharapkan menjadi langkah konkret dalam menciptakan iklim organisasi kemasyarakatan yang tertib, transparan, dan taat hukum di wilayah Kabupaten Banjar.

Triwulan Pertama 2025, Ditjen AHU Tuntaskan 2,9 Juta Permohonan



Jakarta – Direktorat Jenderal (Ditjen) Administrasi Hukum Umum (AHU) Kementerian Hukum (Kemenkum) mengawali tahun 2025 dengan catatan produktif dalam memberikan layanan kepada masyarakat. Di tiga bulan pertama ini, Ditjen AHU berhasil menyelesaikan 2.900.948 permohonan.

Dari target yang dibebankan sebanyak 2.913.595 permohonan, unit kerja yang dipimpin Direktur Jenderal Widodo ini telah menyelesaikan 99,57 persen atau hampir mendekati ekspektasi. Sementara 12.647 permohonan di antaranya sedang dalam proses penyelesaian.

Adapun capaian ini meningkat 5,73 persen dari raihan triwulan I tahun 2024, yaitu 93,84 persen. Atas capaian tersebut, Menteri Hukum (Menkum) Republik Indonesia, Supratman Andi Agtas, mengapresiasi kinerja Ditjen AHU pada periode triwulan I tahun 2025. Menurutnya, penerapan transformasi digital di Ditjen AHU telah menunjukkan dampak yang nyata terhadap capaian kinerja.

"Capaian ini menunjukkan bahwa transformasi digital yang kita dorong telah memberikan dampak nyata dalam meningkatkan efisiensi dan transparansi layanan hukum kepada masyarakat," ujar Supratman saat memberikan pernyataan dalam sesi konferensi pers tentang Capaian Kinerja Triwulan I Kemenkum, Selasa (15/04/2025) siang di Ruang Soepomo, Gedung Sekretariat Jenderal Kemenkum.

Upaya mempercepat transformasi digital di layanan Ditjen AHU pun sudah mulai terlihat hilalnya. Dalam tiga bulan terakhir, Ditjen AHU sudah melakukan percepatan 95 layanan hukum online dari sebelumnya 79 layanan. Ditjen AHU menargetkan 52 layanan digital lainnya rampung pada Juni 2025, sehingga keseluruhan 147 layanan Ditjen AHU akan terintegrasi pada akhir 2025. "Kami menargetkan seluruh layanan di Kementerian Hukum berbasis digital pada tahun 2025, sehingga masyarakat dapat mengakses layanan dengan lebih mudah dan cepat," tambah Supratman.

Sedangkan realisasi Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) pada Januari-Maret 2025 mencapai Rp311.313.889.586 atau sebesar 118,37% dari target triwulan 1 tahun 2025 yang sebesar Rp263.000.000.000. Angka ini pun melampaui capaian pada periode tahun 2024.

Berdasarkan data penerimaan PNBP tahun 2024 pada tanggal dan bulan yang sama, realisasi PNBP Ditjen AHU tercatat sebesar Rp294.829.428.829,- Berarti terjadi peningkatan PNBP sebesar 5,30 persen dibandingkan tahun 2024," ungkapnya.

"Ini sekaligus sebagai bukti, bahwa kami akan terus menyajikan layanan yang cepat dan berkualitas kepada masyarakat," tegas Supratman.



Untuk memperkuat integrasi data dan penegakan hukum, Ditjen AHU telah melakukan penguatan kerja sama lintas kementerian/lembaga. Di antaranya, Ditjen AHU telah melaksanakan penandatanganan kerja sama dengan berbagai instansi, seperti Kejaksaan Agung, Kementerian Imigrasi dan Pemasarakatan cq. Direktorat Jenderal Pemasarakatan, dan Otoritas Jasa Keuangan.

"Melalui perumusan regulasi strategis dan kerja sama lintas instansi, Ditjen AHU terus memperkuat fondasi hukum nasional demi transparansi, perlindungan WNI, dan penegakan hukum yang berintegritas," ucap Supratman.

Sementara itu, dalam dunia olahraga, Ditjen AHU berperan dalam proses fasilitasi naturalisasi atlet keturunan Indonesia. Di triwulan I ini Ditjen AHU telah menyelesaikan proses naturalisasi enam orang atlet sepak bola untuk membantu Tim Nasional Indonesia dalam kualifikasi Piala Dunia Tahun 2026.

Ole Lennard Ter Haar Romenij yang bermain di Oxford United, salah satu atlet yang dinaturalisasi, tampil apik dengan mencetak gol dalam pertandingan krusial melawan Australia dan Bahrain kemarin. Selain Ole, naturalisasi juga dilakukan kepada Dion Markx, Tim Geypens, Dean James, Emil Audero, dan Joey Pelupessy.

"Kami mendukung perkembangan sepakbola nasional dengan memberikan naturalisasi atlet sepak bola keturunan Indonesia, untuk membawa sepak bola nasional ke kancah dunia," pungkas Supratman.

Kepala Kantor Wilayah Kemenkum Kalimantan Selatan, Nuryanti Widyastuti, turut mendukung capaian Ditjen AHU tersebut. Menurutnya, capaian ini mencerminkan sinergi yang kuat antara pusat dan daerah dalam memberikan layanan hukum yang cepat dan berkualitas kepada masyarakat.

"Prestasi Ditjen AHU ini menjadi semangat bagi kami di daerah untuk terus berinovasi dan memperkuat pelayanan publik, khususnya dalam bidang administrasi hukum. Transformasi digital yang dilakukan di pusat juga telah kami dukung di wilayah, salah satunya melalui optimalisasi layanan AHU Online di Kalimantan Selatan," ujar Nuryanti.

Ia juga menambahkan bahwa percepatan layanan hukum digital cukup memberikan dampak langsung bagi masyarakat dan pelaku usaha di daerah.

Layanan digital ini menunjang kemudahan berusaha dan kepastian hukum, serta memperkuat iklim investasi di Kalimantan Selatan," tutupnya.

Capaian Progresif Kementerian Hukum dalam Pembentukan Regulasi Nasional



Jakarta – Kementerian Hukum (Kemenkum) melalui Direktorat Jenderal Peraturan Perundang-undangan (DJPP) mencatat sejumlah capaian progresif dalam pelaksanaan tugas dan fungsi pembentukan regulasi nasional pada triwulan I tahun 2025.

“Kami mencatatkan progres positif terkait penyusunan peraturan perundang-undangan, proses harmonisasi, serta penerapan transformasi digital,” kata Menteri Hukum, Supratman Andi Agtas, pada saat konferensi pers Capaian Kinerja Triwulan I dan Update Isu Aktual Kementerian Hukum, Selasa (15/04/2025).

Supratman menjelaskan bahwa pada tahun 2025 sebanyak delapan Rancangan Undang-Undang (RUU) dan tiga Rancangan Peraturan Pemerintah (RPP) sebagai aturan pelaksana dari Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) ditetapkan sebagai prioritas nasional.

RUU tersebut meliputi: RUU Narkotika dan Psikotropika, RUU Hukum Acara Perdata, RUU Keamanan dan Ketahanan Siber, RUU Perubahan atas UU Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan PKPU, RUU Jaminan Benda Bergerak, RUU Grasi, Amnesti, Abolisi, dan Rehabilitasi, RUU Pelaksanaan Pidana Mati, serta RUU Penyesuaian Ketentuan Pidana dalam UU dan Perda.

Sementara itu, ketiga RPP tersebut adalah: RPP Tata Cara dan Kriteria Penetapan Hukum yang Hidup dalam Masyarakat, RPP Tata Cara Perubahan Pidana Penjara Seumur Hidup dan Pidana Mati, serta RPP Tata Cara Pelaksanaan Pidana dan Tindakan.

Ia mengatakan, selama Januari hingga Maret 2025 terdapat 43 peraturan perundang-undangan dalam tahap penyusunan, yang mencakup RUU, RPP, RPerpres, dan RPermenkum.

“Sampai dengan bulan Maret 2025, terdapat 7 RUU, 8 RPP, 5 Rancangan Peraturan Presiden (RPerpres), dan 23 Rancangan Peraturan Menteri Hukum (RPermenkum) yang sedang dalam tahap penyusunan,” jelas Supratman di Ruang Soepomo Kemenkum. Di samping itu, sebanyak 272 peraturan telah resmi diundangkan. Peraturan tersebut terdiri dari 15 peraturan dalam Lembaran Negara, 11 peraturan dalam Tambahan Lembaran Negara, dan 246 peraturan dalam Berita Negara.

Dalam penanganan perkara litigasi dan non-litigasi, Kemenkum juga menangani 82 perkara pengujian Undang-Undang di Mahkamah Konstitusi, dengan rincian 43 perkara telah diselesaikan dan 39 masih dalam proses. Di Mahkamah Agung, terdapat 6 perkara pengujian peraturan perundang-undangan di bawah undang-undang yang masih dalam proses.



Terkait capaian Harmonisasi Peraturan Perundang-undangan, telah diterima 325 permohonan di tingkat pusat, terdiri dari 96 Rancangan Peraturan di bidang Politik, Hukum, Pertahanan, Keamanan, Pemimipas, Komdigi; 131 Rancangan Peraturan di bidang Kesejahteraan Rakyat; dan 98 Rancangan Peraturan di bidang Perekonomian. Selain itu, Kemenkum juga menerima 1.999 Rancangan Peraturan Daerah. Dari total 2.324 Rancangan Peraturan yang ada, Kemenkum telah menyelesaikan proses harmonisasi bagi 2.179 Rancangan Peraturan atau sebanyak 93,7%.

"Proses harmonisasi ini diperkuat dengan penggunaan aplikasi e-Harmonisasi yang memungkinkan pengajuan harmonisasi secara daring. Inovasi ini mempercepat layanan hingga lima hari kerja, serta meningkatkan transparansi dan akuntabilitas," pungkasnya.

Selain e-Harmonisasi, saat ini DJPP telah mengembangkan sebelas aplikasi lainnya yang mendukung efisiensi dan transparansi proses legislasi. Supratman menekankan bahwa transformasi digital dan percepatan pelayanan publik di bidang pembentukan regulasi hukum menjadi komitmen Kementerian Hukum dalam membangun sistem hukum yang adaptif dan profesional.

"Kinerja yang telah dicapai di triwulan pertama ini menjadi langkah konkrit Direktorat Jenderal Peraturan Perundang-undangan dalam membangun sistem hukum nasional yang responsif, akuntabel, dan berkualitas. Kami terus mendorong pemanfaatan teknologi agar pelayanan publik dalam bidang legislasi semakin cepat, transparan, dan efisien," tegasnya.

Kepala Kantor Wilayah Kemenkum Kalimantan Selatan, Nuryanti Widyastuti, mendukung capaian DJPP tersebut. Ia menyebut bahwa kemajuan digitalisasi dan efektivitas pembentukan regulasi di tingkat pusat memberikan pengaruh positif hingga ke daerah.

"Kami di daerah merasakan langsung manfaat dari percepatan dan kemudahan layanan harmonisasi regulasi. Aplikasi e-Harmonisasi membantu dalam proses penyampaian dan koordinasi dengan pusat, sehingga rancangan peraturan daerah dapat segera dikaji dan diselaraskan," ujar Nuryanti.

Menurutnya, kolaborasi yang kuat antara pusat dan daerah menjadi kunci sukses dalam mewujudkan sistem hukum nasional yang adaptif dan berkualitas. "Kanwil Kemenkum Kalimantan Selatan siap terus mendukung agenda besar reformasi regulasi dan transformasi digital yang tengah dijalankan DJPP," ungkapnya.

70.838 Permohonan KI Pada Triwulan I 2025, Tanda Masyarakat Mulai Sadar Pentingnya Pelindungan KI



Jakarta - Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual Kementerian Hukum (DJKI Kemenkum) mencatatkan kinerja signifikan pada triwulan I 2025 dengan total 70.838 permohonan Kekayaan Intelektual (KI) yang masuk, didominasi oleh hak cipta (36.296) dan merek (29.773). Jumlah permohonan ini meningkat jika dibandingkan dengan triwulan I 2024 yang berjumlah 61.704 permohonan KI.

Menteri Hukum (Menkum), Supratman Andi Agtas, menyebutkan peningkatan permohonan KI tersebut menunjukkan bahwa masyarakat Indonesia mulai sadar akan pentingnya pelindungan hukum atas karya dan inovasi.

“Peningkatan permohonan KI yang signifikan ini menunjukkan bahwa masyarakat Indonesia sudah mulai aware (sadar) atas pentingnya melakukan pelindungan kekayaan intelektual,” ujar Supratman di Ruang Soepomo Kemenkum, Selasa (15/04/25).

Lebih lanjut, Menkum menerangkan bahwa DJKI juga berhasil menyelesaikan 116.126 permohonan KI termasuk permohonan tahun sebelumnya, dengan mayoritas penyelesaian di sektor merek (66.995) dan hak cipta (36.296).

Khusus untuk permohonan merek, DJKI telah melakukan percepatan penyelesaian permohonan pada proses pemeriksaan substantif sebanyak 12.881 dan pada proses pelayanan teknis (distribusi kepada pemeriksa) sebanyak 10.775 sampai dengan tanggal 31 Maret 2025 sehingga saat ini sudah tidak terdapat lagi tunggakan penyelesaian permohonan merek.

“Penerbitan sertifikat merek ini merupakan wujud kepastian hukum bagi para pelaku usaha, dalam menggunakan merek secara legal dan eksklusif dalam kegiatan berbisnis,” ucap Supratman saat melakukan konferensi pers tentang capaian kinerja triwulan I Kemenkum.

Pria yang akrab disapa Bang Maman ini menerangkan bahwa selain permohonan KI, penegakan hukum KI juga tetap menjadi perhatian bagi DJKI. Dalam aspek penegakan hukum, DJKI telah menindaklanjuti total 19 laporan yang masuk di sektor merek, hak cipta, serta desain industri, dengan status 4 perkara selesai dan 15 lainnya dalam proses penyelesaian.



Melalui seluruh layanan KI, lanjut Supratman, DJKI telah mencatat penerimaan negara bukan pajak (PNBP) untuk triwulan I 2025 sebesar Rp220,90 miliar dengan kontribusi terbesar dari sektor paten (56,42%) dan merek (39,58%). Perolehan PNBP ini lebih tinggi jika dibandingkan dengan periode yang sama di tahun 2024 yang berjumlah Rp219.51 miliar.

“Kami patut berbangga dan berterima kasih terhadap kinerja para pegawai DJKI Kemenkum. Dengan kerja keras seluruh pegawai, kami berhasil membukukan PNBP untuk Triwulan I 2025 sebesar Rp 220,90 miliar. Perolehan ini lebih tinggi jika dibandingkan dengan perolehan PNBP Triwulan I 2024 tahun lalu,” terang Supratman kepada awak media.

DJKI Kemenkum secara khusus diberikan mandat oleh Kementerian PPN/BAPPENAS melalui Program Prioritas Nasional 2025-2027 untuk menyusun Rancangan Peraturan Presiden tentang Peta Jalan (Roadmap) Pengembangan KI di Indonesia, sebagai upaya mendukung Asta Cita Pemerintahan Presiden RI 2024-2029 dalam menjadikan ekonomi kreatif berbasis Kekayaan Intelektual sebagai new engine of economic growth. Regulasi ini akan menjadi landasan pembangunan ekosistem kreatif Indonesia hingga 2045 dengan fokus pada akselerasi pengembangan ekosistem KI Nasional bagi UMKM, perguruan tinggi, dan sektor industri kreatif untuk memperkuat kontribusinya terhadap perekonomian nasional.

DJKI Kemenkum terus berupaya meningkatkan layanan digital untuk masyarakat sebagai bagian dari Program Transformasi Digital Kementerian Hukum. DJKI telah mempersiapkan inventarisasi dan evaluasi infrastruktur serta arsitektur yang sesuai Referensi Arsitektur Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE), penganggaran terhadap hardware, software dan aplikasi pendukung lainnya. Upaya tersebut dilakukan untuk mewujudkan sistem pemerintahan digital 2045.

Secara terpisah Kepala Kantor Wilayah Kemenkum Kalimantan Selatan, Nuryanti Widyastuti mendukung capaian Ditjen Kekayaan Intelektual (DJKI) pada triwulan pertama 2025 yang menunjukkan bahwa kesadaran masyarakat terhadap pentingnya perlindungan kekayaan intelektual semakin meningkat.

“Ini merupakan perkembangan yang sangat positif, karena semakin banyak pelaku usaha, kreator, dan inovator yang memahami pentingnya memiliki hak eksklusif atas karya dan inovasinya. Kami di Kalimantan Selatan mendukung penuh langkah percepatan pelayanan KI, termasuk melalui edukasi dan fasilitasi pendaftaran KI bagi UMKM dan pelaku ekonomi kreatif lokal,” ucapnya.

Kanwil Kemenkum Kalimantan Selatan Gelar Rapat Harmonisasi Dua Ranperbup Tapin



Banjarmasin, Humas_Info – Kantor Wilayah Kementerian Hukum Kalimantan Selatan menggelar rapat harmonisasi terhadap dua rancangan peraturan bupati (Ranperbup) Kabupaten Tapin pada Kamis (17/04/2025). Kegiatan ini dipimpin oleh Eryck Yulianto, Perancang Peraturan Perundang-undangan Ahli Madya, bersama Kepala Divisi Peraturan Perundang-undangan dan Pembinaan Hukum, Anton Edward Wardhana, serta jajaran Jabatan Fungsional Tertentu (JFT) Perancang di lingkungan Kanwil.

Dalam sambutannya, Anton menyampaikan bahwa proses harmonisasi merupakan tahap penting untuk menyelaraskan rancangan peraturan daerah maupun rancangan peraturan bupati dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Hal ini dimaksudkan agar tidak terjadi tumpang tindih regulasi dan menciptakan kepastian hukum.

"Harmonisasi ini tidak hanya bertujuan memastikan kesesuaian norma, tetapi juga memberikan masukan dan saran. Meski demikian, secara substansi, penyusunan peraturan tetap menjadi kewenangan pemerintah daerah," ujarnya.

Adapun dua Ranperbup yang dibahas dalam rapat kali ini meliputi Rancangan Peraturan Bupati Tapin tentang Petunjuk Teknis Program Bantuan Sosial Tunai dalam Rangka Penanganan Dampak Inflasi Tahun Anggaran 2025 serta Rancangan Peraturan Bupati Tapin tentang Pemberian Tambahan Penghasilan Pegawai Aparatur Sipil Negara.

Pihak Sekretariat Daerah Kabupaten Tapin turut hadir untuk menjelaskan latar belakang dan urgensi pengajuan kedua Ranperbup tersebut. Sementara itu, jajaran perancang dari Kanwil Kemenkum Kalimantan Selatan memberikan berbagai catatan dan masukan agar rancangan peraturan yang diajukan dapat disempurnakan sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.



Pemeriksaan Interim Laporan Keuangan Kemenkumham di Kanwil Kalimantan Selatan Tahun 2024 Selesai, Ditutup dengan Exit Meeting



Banjarmasin, Humas_Info — Kantor Wilayah Kementerian Hukum Kalimantan Selatan (Kemenkum Kalsel) bersama Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia (BPK RI) secara resmi menutup rangkaian kegiatan Pemeriksaan Interim atas Laporan Keuangan Tahun Anggaran 2024 melalui Exit Meeting yang dilaksanakan pada Kamis (17/04/2025) di Balai Pertemuan Garuda, Kanwil Kemenkumham Kalsel. Kegiatan ini merupakan bagian dari komitmen bersama dalam menjaga transparansi pengelolaan keuangan negara dan menjadi penanda berakhirnya proses pemeriksaan yang telah berlangsung selama empat hari sejak Senin, 14 April 2025.

Pemeriksaan interim ini dilaksanakan sebagai tindak lanjut atas Surat Tugas Anggota I BPK RI Nomor 17/ST/III/1/2025 tertanggal 2 Januari 2025, yang menugaskan tim auditor untuk memeriksa laporan keuangan Kementerian Hukum dan HAM, termasuk di wilayah Kalimantan Selatan.

Dalam sambutannya, Kakanwil Kemenkum Kalsel, Nuryanti Widyastuti mengapresiasi kerja sama yang terjalin antara Kanwil dan BPK RI selama proses pemeriksaan berlangsung. Ia juga menekankan bahwa pihaknya berkomitmen penuh untuk menjaga integritas dalam pengelolaan anggaran dan Barang Milik Negara (BMN).

“Segala hasil pemeriksaan dan catatan dari BPK akan segera kami tindak lanjuti sesuai rekomendasi yang diberikan, agar perbaikan dapat dilakukan secara cepat dan tepat. Ini penting dalam rangka menjaga kualitas laporan keuangan,” tegas Nuryanti.

Ia juga berharap hasil pemeriksaan ini dapat menjadi bahan evaluasi untuk penyusunan laporan keuangan dan pelaksanaan anggaran tahun berjalan dan menjadi penguat dalam mempertahankan opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dari BPK RI.

Turut Hadir dalam kegiatan tersebut Kepala Kanwil Direktorat Jenderal Imigrasi Kalimantan Selatan, Yan Wely Wiguna, Kepala Divisi Peraturan Perundang-undangan dan Penyuluhan Hukum Anton Edward Wardhana, serta tim pemeriksa BPK RI bersama tim pemeriksa. Para kepala unit pelaksana teknis dari berbagai satuan kerja juga turut mengikuti kegiatan ini.

Kegiatan Exit Meeting ditutup dengan penyerahan hasil pemeriksaan oleh BPK RI kepada pihak Kabtir Wilayah secara simbolis diterima oleh Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum Kalimantan Selatan. Penyerahan ini menjadi langkah awal bagi Kanwil Kemenkum Kalimantan Selatan untuk segera menyusun tindak lanjut dan menyiapkan perbaikan atas masukan yang diberikan.

Momen ini juga menjadi pengingat bagi seluruh jajaran agar terus meningkatkan sinergi, profesionalisme, dan kepatuhan terhadap prinsip-prinsip tata kelola keuangan yang baik.

Jaring Peserta Terbaik Peacemaker Justice Award, Kanwil Kemenkum Kalsel Mulai Laksanakan Seleksi Daerah Tabalong dan Hulu Sungai Selatan

Banjarmasin, Humas_Info - Kantor Wilayah Kementerian Hukum (Kemenkum) Kalimantan Selatan, yang tergabung ke dalam Panitia Seleksi Daerah (Panselda) Kabupaten/Kota mulai melaksanakan serangkaian seleksi daerah Peacemaker Justice Award Tahun 2025. Kegiatan seleksi daerah ini dilaksanakan secara daring pada Kamis (17/04) untuk peserta dari Kabupaten Tabalong dan Kabupaten Hulu Sungai Selatan.

Pada kegiatan ini untuk Panitia Seleksi Daerah dari Kanwil Kemenkum Kalsel merupakan Koordinator Penyuluh Hukum, Dianor juga sebagai anggota Panselda untuk Kabupaten Hulu Sungai Selatan, dan Togi Leonardo Situmorang, sebagai anggota Panselda Kabupaten Tabalong. Unsur lainnya yang berhadir sebagai Panitia Seleksi Daerah tingkat Kabupaten/Kota adalah Asisten Pemerintahan dan Kesra Kabupaten/Kota, Unsur Bagian Hukum Sekretariat Daerah, Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Hakim pada Pengadilan Negeri, dan unsur Lembaga Bantuan Hukum di daerah.

Kanwil Kemenkum Kalsel menyampaikan bahwa kegiatan seleksi tingkat Kabupaten/Kota ini merupakan seleksi tahap awal bagi Lurah/Kepala Desa peserta PJA untuk menentukan peserta yang akan direkomendasikan untuk mengikuti Peacemaker Training dan berhak memperoleh gelar Non Litigation Peacemaker. Pada tahap ini Panselda akan menilai sejumlah persyaratan administratif yang telah diajukan oleh para peserta, khususnya Surat Keputusan Pembentukan Pos Bantuan Hukum di Kelurahan/Desa. Selain itu, kegiatan ini yang paling penting adalah untuk menilai bagaimana peranan Kepala Desa/Lurah dalam menyelesaikan sengketa atau perselisihan masyarakat yang terjadi di wilayah kerja peserta.

Bagian Hukum Setda menyampaikan bahwa pihaknya telah mendorong para peserta untuk melengkapi semua persyaratan yang diperlukan. Pada kesempatan ini seluruh Panselda akan memeriksa dan menilai satu per satu dokumen substantif penanganan perkara yang dilaksanakan oleh peserta, meliputi laporan narasi penyelesaian sengketa, laporan pengalaman dan inovasi yang dilaksanakan, dokumen video penyelesaian sengketa, serta pemberitaan media massa atas penanganan perkara yang dilakukan peserta.

Pada kegiatan ini, seluruh Panselda berpedoman pada Petunjuk Teknis yang telah ditetapkan oleh Badan Pembinaan Hukum Nasional dalam melakukan penilaian dokumen yang diupload peserta dan mengkategorikan penyelesaian sengketa dalam kategori rendah, ringan, sedang, dan berat, untuk kemudian merumuskan penilaian terhadap peserta. Panselda menemukan bahwa beberapa penyelesaian sengketa yang diajukan oleh para peserta sebagian besar meliputi sengketa pertanahan, mediasi dalam perkara kecelakaan lalu lintas, serta perkara lainnya yang mengandung unsur tindak pidana.

Atas serangkaian proses seleksi yang dilakukan dan telah dibahas bersama-sama seluruh unsur Panselda. Hasil seleksi menyimpulkan dan memberikan rekomendasi kepada 6 (enam) orang peserta dari Kabupaten Tabalong, dan 3 (tiga) orang peserta dari Kabupaten Tanah laut untuk dapat mengikuti Peacemaker Training untuk kemudian dapat diseleksi kembali pada tahap Panselda Provinsi Kalimantan Selatan.



Kuatkan Legalitas dan Dorong Inovasi, Kemenkum Kalsel Gandeng Politeknik Negeri Tanah Laut Tingkatkan Layanan KI



Tanah Laut, KI_Info – Dalam rangka memperluas pemahaman dan penerapan perlindungan Kekayaan Intelektual (KI) di lingkungan pendidikan tinggi, Kantor Wilayah Kemenkum Kalimantan Selatan melalui Bidang Pelayanan KI melakukan koordinasi strategis dengan Politeknik Negeri Tanah Laut (Politala), Kamis (17/04).

Pertemuan ini membahas tindak lanjut kerja sama dalam peningkatan layanan KI di Kabupaten Tanah Laut, sekaligus memperkuat sinergi antara dunia pendidikan dan pemerintah dalam mendorong budaya inovasi serta perlindungan karya. Kegiatan koordinasi yang berlangsung di kampus Politala ini dipimpin langsung oleh Kepala Divisi Pelayanan Hukum Meidy Firmansyah, didampingi Kepala Bidang Pelayanan KI serta tim pelaksana Bidang KI Kanwil.

Dari pihak Politala, hadir jajaran pimpinan lengkap, antara lain Wakil Direktur I Bidang Akademik Ir. Nuryati, S.T., M.Eng., Wakil Direktur II Tekad Budiantoro, M.Pd., Wakil Direktur III Titik Wijayati, M.Pd., Ka. P3M Veri Julianto, M.Si.. Hadir juga para Ketua Program Studi dan Jurusan.

Salah satu poin strategis dalam pertemuan ini adalah rencana revisi Nota Kesepahaman (MoU) yang telah ditandatangani sebelumnya, guna menyesuaikan dengan nomenklatur terkini dari sebelumnya Kementerian Hukum dan HAM menjadi Kementerian Hukum. Langkah ini dinilai penting untuk menjaga aspek legalitas serta menjadi landasan kuat dalam menjalankan berbagai program kerja sama ke depan.

Dalam diskusi tersebut juga dibahas implementasi kebijakan pencatatan Hak Cipta sebagai syarat kelulusan mahasiswa, yang akan dituangkan dalam perjanjian kerja sama dengan seluruh program studi. Kebijakan ini diharapkan mampu menumbuhkan kesadaran akan pentingnya perlindungan terhadap karya ilmiah sejak dini.

Lebih jauh, kerja sama akan diperluas mencakup pendampingan pendaftaran KI bagi dosen, mahasiswa, hingga UMKM binaan kampus. Fasilitasi akan dilakukan melalui Sentra KI (IP Corner) Politala, yang didukung teknis langsung oleh Kanwil Kemenkum Kalsel.

“Selain pendampingan pendaftaran KI, kami juga mendorong agar pemahaman tentang kekayaan intelektual menjadi bagian dari kurikulum pembelajaran melalui program KI Goes to Campus. Ini langkah konkret agar generasi akademik kita tumbuh dengan kesadaran hukum dan inovasi,” ungkap Meidy Firmansyah.

Dengan adanya kolaborasi ini, diharapkan terbentuk ekosistem KI yang lebih kuat di wilayah Kalimantan Selatan, khususnya di lingkungan kampus sebagai pusat lahirnya ide dan inovasi.

Desain Galon Bisa Dilindungi Hak Kepemilikannya? Ini Langkah Kemenkum Kalsel dan Pelaku Usaha Air Minum



Banjarmasin, Humas_Info – Tahukah Anda bahwa desain botol air minum kemasan yang biasa Anda lihat di toko ternyata bisa dilindungi secara hukum? Inilah yang menjadi bahasan menarik dalam kunjungan Kantor Wilayah Kemenkum Kalimantan Selatan ke PT. Panen Embun Kemakmuran, Kamis (17/4).

Pertemuan tersebut tak sekadar kunjungan biasa. Dipimpin langsung oleh Kepala Divisi Pelayanan Hukum bersama jajaran Pelayanan Kekayaan Intelektual (KI), pembahasan mengerucut pada satu isu krusial: desain industri dan bagaimana bentuk visual suatu produk bisa menjadi aset bernilai tinggi.

Ratnawati, Ketua Asosiasi Air Minum Kemasan Indonesia, menyambut serius inisiatif ini. Menurutnya, desain galon atau botol bukan hanya urusan estetika, tapi juga identitas merek.

“Kami sering melihat produk-produk kami ditiru—mulai dari bentuk, warna, hingga label. Ini tentu merugikan pelaku usaha yang sudah berinvestasi besar dalam branding,” ujarnya.

Tim dari Kanwil Kemenkum Kalsel menjelaskan bahwa desain industri yang didaftarkan secara resmi akan mendapatkan perlindungan hukum hingga 10 tahun, dan dapat diperpanjang. Dengan begitu, pelaku usaha tak hanya aman dari penjiplakan, tapi juga membuka peluang ekspansi bisnis dan kerja sama yang lebih luas.

“Ini bukan hanya soal perlindungan, tapi juga strategi peningkatan daya saing di pasar,” ungkap Meidy Firmansyah, Kepala Divisi Pelayanan Hukum.

Pertemuan ini juga menjadi batu loncatan menuju sinergi yang lebih kuat antara pemerintah dan pelaku usaha dalam edukasi kekayaan intelektual.

“Kami ingin pelaku usaha lokal makin melek soal pentingnya KI. Bukan hanya merek, tapi juga desain, paten, dan hak cipta,” tambahnya.

Siapa sangka, galon yang Anda pegang hari ini bisa menjadi karya intelektual yang punya nilai miliaran rupiah?

MPDN Kota Banjarmasin Rampungkan Serah Terima Protokol Notaris Nurnaningsih



Banjarmasin, AHU_Info – Setelah hampir tertunda selama dua tahun, Majelis Pengawas Daerah Notaris (MPDN) Kota Banjarmasin akhirnya merampungkan serah terima protokol notaris milik almarhumah Notaris Nurnaningsih, yang telah wafat pada April 2024 lalu.

Dalam proses tersebut, MPDN Banjarmasin dibantu oleh Pengurus Daerah Ikatan Notaris Indonesia (I.N.I) Kota Banjarmasin. Mengingat banyaknya jumlah akta yang dibuat oleh almarhumah, MPDN menunjuk sedikitnya tujuh orang notaris sebagai penerima protokol.

"Kami ucapkan terima kasih atas kehadiran rekan-rekan dalam agenda serah terima protokol notaris Ibu Nurnaningsih. Alhamdulillah, kegiatan berjalan dengan lancar," ujar Ketua MPDN Kota Banjarmasin, Eryck Yulianto, pada Sabtu (19/04/2025). Ia menambahkan bahwa penundaan serah terima protokol notaris dapat menjadi bom waktu yang berdampak pada ketidakpastian hukum bagi para pihak yang memerlukan jasa kenotariatan.

"Ke depan, MPDN Banjarmasin akan terus berkolaborasi dengan pihak-pihak terkait dalam menjalankan fungsi pembinaan terhadap notaris di Kota Banjarmasin," tegasnya.

Sementara itu, perwakilan keluarga sekaligus ahli waris, Saharuddin, menyampaikan apresiasi atas bantuan dan perhatian semua pihak yang terlibat.

"Terima kasih kepada MPDN serta semua pihak yang telah meringankan beban keluarga kami," ujarnya. Langkah yang dilakukan MPDN Banjarmasin ini merupakan implementasi dari ketentuan Pasal 62, Pasal 63, dan Pasal 64 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014.





**KEMENTERIAN HUKUM
KANTOR WILAYAH KALIMANTAN SELATAN**



Terhubung lebih dekat:



[kemenkumkassel](#)



[@kemenkumkassel](#)



[kassel.kemenkum.go.id](#)